



PROVINSI RIAU

2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



**INSPEKTORAT
DAERAH**

PROVINSI RIAU



(0761) 22300



JL. Cut Nyak Dien



inspektorat.riau.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Riau	19
2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Riau	33
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	39
BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH	51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025.....	53
3.3 Program dan Kegiatan.....	55
BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU.....	67
BAB IV	
PENUTUP	77



BAB I

PENDAHULUAN

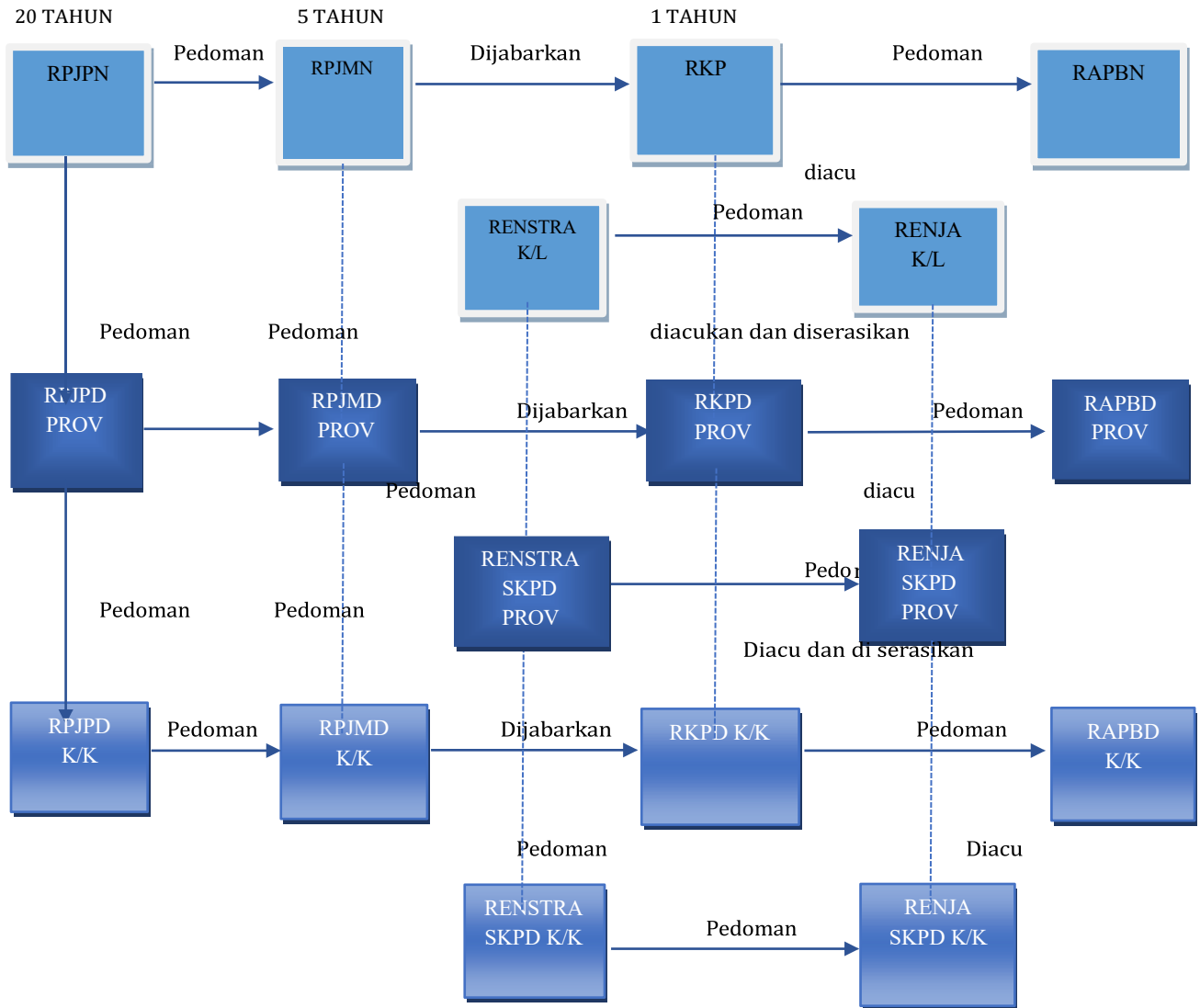
I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) ini juga merupakan sebuah dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Secara hirarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.



Gambar 1.2

**Skema Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKP,RENSTRA
Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota**



1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nmr 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1344);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 917);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023



- tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.
 19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembar Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
 21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 3.);
 23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53);
 24. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;



25. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
26. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau di Tahun 2026 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau ini adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Riau untuk memastikan pencapaian target tahunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau di tahun 2026;
2. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja ditahun 2026 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja Inspektorat Daerah Provinsi Riau disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja dengan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, serta proses penyusunan Renja.



BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dengan subtansi bab sebagai berikut.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Riau, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Riau yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Riau, program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian berupa: rencana kerja dan pendanaan atas program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 dan tahun 2027

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah- kaidah, dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2024. Laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah memuat capaian terhadap target tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan serta capaian realisasi anggaran pada masing – masing program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja ini merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan. Selain itu, Evaluasi pelaksanaan rencana kerja juga menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk penyusunan perencanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 sampai dengan tahun berjalan (2025) disajikan dalam format T-C.29 pada tabel 2.1 berikut.



Tabel 2.1 (T-C.29)

**Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah
Provinsi Riau dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah
s.d Tahun 2025 Provinsi Riau**

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja) OPD pada Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog/ Keg s.d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
i	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	100 Persen			100 Persen		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50 Jenis	20 Jenis					20 Jenis	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			20 Paket	20 Paket	100	30 Paket	50 Paket	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	300 Jenis	182 Jenis					182 Jenis	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan			1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	100



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja) OPD pada Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog/ Keg s.d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	50144 Porsi	10566 Porsi					10566 Porsi	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan			3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	6 paket	100
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang dicetak dan digandakan yang disediakan	150 Jenis	60 Jenis	60 Jenis	60 Jenis	100	60 Jenis	180 Jenis	120
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	615 kali	380 Kali					380 Kali	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			150 Laporan	150 Laporan	100	50 Laporan	200 Laporan	100
ii	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen			100 Persen		
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	120 Unit	28 Unit	10 Unit	10 Unit	100	2 Unit	40 Unit	33
iii	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	100 Persen	100 Persen	100 Persen			100 Persen		
7	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	10915 Surat	3563 Surat				2200 Surat	5763 Surat	



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja) OPD pada Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog/ Keg s.d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	100
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	120 Rekening	52 Rekening	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	54 Laporan	45
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	240 Orang	240 Orang					240 Orang	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 Bulan	36 Bulan					36 Bulan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	2 laporan	100
IV	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 Persen	100 Persen	100 Persen			100 Persen		
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas,Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas /Oprasional yang dipelihara	65 Unit	23 Unit	14 Unit	14 Unit	100	14 Unit	51 Unit	78
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1363 Unit	323 Unit	20 Unit	20 Unit	100	75 Unit	418 Unit	31
13	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung yang dipelihara	210 Ruang	42 Ruang					42 Ruang	



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja) OPD pada Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog/ Keg s.d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung yang dipelihara	46 Unit	46 Unit	5 Unit	5 Unit	100	3 Unit	54 Unit	117
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE REALISASI AUDIT/JUMLAH LAPORAN HASIL AUDIT	100 Persen	100 Persen	100 Persen			100 Persen		
VI	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Realisasi Audit/Jumlah Laporan Hasil Audit	100 Persen	100 Persen	100 Persen			100 Persen		
15	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	60 laporan	75 Laporan	75 Laporan	107 Laporan	142	75 Laporan	257 Laporan	428
16	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	980 Laporan	512 Laporan	130 laporan	481 laporan	370	400 laporan	1393 laporan	142
17	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	3 Laporan	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	9 laporan	180
18	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan yang tepat waktu	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	5 laporan	100
19	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	10 Ikhtisar laporan	4 Ikhtisar laporan	4 Ikhtisar Laporan	4 Ikhtisar Laporan	100	4 Ikhtisar Laporan	12 Ikhtisar Laporan	120
VII	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Persen	100 Persen	100 Persen			100 Persen		



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja) OPD pada Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog/ Keg s.d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
20	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	150 laporan	22 laporan	15 Laporan	82 Laporan	546	20 Laporan	124 Laporan	83
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Laporan Hasil Evaluasi dan Persentase OPD yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen			100 Persen		
VIII	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang telah dibuat	100 Persen	100 Persen				100 Persen		
21	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	5 laporan	2 laporan					2 laporan	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100	2 laporan	6 Laporan	100
IX	Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen			100 Persen		
22	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan implementasi SPIP	152 OPD	16 OPD	36 OPD	36 OPD	100	36 OPD	88 OPD	58
23	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	120
24	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	5 laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	6 Laporan	120



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja) OPD pada Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog/ Keg s.d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
25	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	5 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	1 laporan	5 laporan	100



Dari data tabel diatas untuk evaluasi tahun 2024 dapat digambarkan capaian kinerja program/kegiatan yang memenuhi/melebihi/tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

I. Realisasi Program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas,Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

a. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

a. Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi

- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

II. Realisasi Program / kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



- b. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Reviu Laporan Keuangan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
 - a. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - b. Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi
 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

III. Realisasi Program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - b. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Reviu Laporan Kinerja
 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - b. Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi
 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi



- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

IV. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan

Kegiatan yang tidak dapat memenuhi target kinerja pada tahun 2024 adalah pada Kegiatan Pendampingan dan Asistensi di sub kegiatan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah tidak mencapai 100%, hal ini disebabkan karena penilaian SPIP Provinsi Riau tidak dilaksanakan pada seluruh perangkat daerah, hanya mengambil uji petik pada beberapa perangkat daerah sesuai dengan tema yang telah ditetapkan untuk diuji pada tahun 2024 ini adalah kemiskinan, stunting, ketahanan pangan, lingkungan hidup dan resiliensi bencana, pariwisata dan UMKM, pengelolaan keuangan, pengembangan Kawasan, pengembangan sdm, penguatan RB, penanaman modal, dan trantibum.

Sementara faktor penyebab terpenuhinya target program/kegiatan adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun walaupun tidak seluruhnya didukung oleh anggaran.
2. Partisipasi aktif APIP dalam melaksanakan pengawasan.

V. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Tidak terpenuhi target capaian beberapa program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Riau yang telah ditetapkan hal ini juga sangat mempengaruhi capaian tujuan/sasaran Kepala Daerah.

VI. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

1. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Inspektorat Daerah Provinsi Riau menetapkan skala prioritas dalam penetapan kegiatan. Yang menjadi pendukung indikator Kinerja Utama itulah yang menjadi prioritas tertinggi. Sehingga apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam



melaksanakan pengawasan dan pembinaan dapat berjalan baik dan mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah yang telah ditetapkan.

2. Dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam RPJMD serta dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penguatan APIP maka ada beberapa yang perlu diperhatikan antara lain:
 - a. Mengoptimalkan peran pengawasan dalam capaian akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi Riau dan perangkat daerah
 - b. Mengoptimalkan tindaklanjut pengaduan masyarakat dengan menyediakan media layanan berbasis online yaitu aplikasi WBS (*Whistle Blowing System*), diharapkan dengan tersedianya aplikasi tersebut maka pengaduan yang masuk segera dapat ditindaklanjuti tanpa perlu memakan waktu yang lama;
 - c. Melaksanakan pendampingan Pembangunan Zona Integritas yang berkelanjutan dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi sehingga terbangunnya unit kerja percontohan Zona Integritas di Pemerintah Provinsi Riau;
 - d. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi dalam peningkatan tindaklanjut hasil pengawasan; dan
 - e. Meningkatkan SDM APIP melalui pengembangan Kompetensi dengan memberikan pendidikan yang substantif, sehingga dalam melaksanakan pengawasan menetapkan APIP sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU

Dalam analisa kinerja pelayanan pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

- a. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



- b. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) menyelenggarakan tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Daerah Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 3. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri;
 5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana telah disusunnya renstra Tahun 2019-2024 sebagai bentuk penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024, maka dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana keterangan diatas maka sasaran yang ingin di capai oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau adalah dengan Meningkatnya Efektifitas

Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah



(*Anti corruption Activities*) dan Meningkatnya Kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (*Assurance dan Consultant Activities*) dengan indikator sebagai berikut:

1. Jumlah OPD yang diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM
2. Indeks Maturitas SPIP
3. Level Kapabilitas APIP (IACM)

Gambaran capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra 2019- 2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Maturitas SPIP	Indeks 3 (skor 3,20)	Indeks 3 (skor 3,394)	106,06
2	Level Kapabilitas APIP (IACM)	Level 3 (skor 3,40)	Level 3 (skor 3,590)	105,59
Rata-Rata Capaian (%)				105,83

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Dari table diatas dapat dilihat bahwa total rata – rata capaian pengukuran kinerja sasaran strategis 1 adalah 105,83 yang berarti masuk dalam kategori “**sangat baik**”.

1. Indeks Maturitas SPIP

Dalam upaya perbaikan tata kelola maka perlu penguatan pada perencanaan strategis. Strategi perencanaan merupakan salah satu komponen yang dibangun dalam peningkatan maturitas SPIP. Pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP untuk Tahun 2024 telah mengalami perubahan. Sebagaimana Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah, maka pelaksanaan SPIP di Tahun 2024 telah menerapkan SPIP Terintegrasi.

Evaluasi atas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Riau di awali dengan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan



melihat kesesuaian atas proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagaimana ditetapkan dalam pedoman peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah, yang mana kesesuaian penilaian tersebut dilihat dari 3 tahapan yaitu: 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan dan 3. Pelaporan.

Pada saat penilaian mandiri maturitas SPIP dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP dan proses akhir dilakukan evaluasi melalui ekspos panel oleh BPKP Jakarta.

Capaian kinerja dari Indikator Indeks maturitas yang SPIP, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan dari indikator ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan implementasi SPIP ada 5 unsur penilaian yaitu:

- Lingkungan pengendalian
- Penilaian risiko
- Kegiatan pengendalian
- Informasi dan komunikasi
- Kegiatan pemantauan

Secara umum tingkat maturitas SPIP dapat digambarkan sebagai berikut :





Rumus yang digunakan untuk mengukur indikator Indeks Maturitas SPIP adalah sebagai berikut :

Tingkat Level Maturitas SPIP yang hendak dicapai setelah di *Quality Assurance* (QE) oleh BPKP

Berdasarkan hasil evaluasi Deputi BPKP Provinsi Riau Nomor: PE.09.03/LHP-461/PW04/3/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada pemerintah Provinsi Riau tahun 2024 bahwa evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Provinsi Riau berada pada **level 3** (terdefinisi) dengan skor **3,394**. Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.2
Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Tahun 2024

No	Fokus Penilaian	Hasil PM yang dilakukan PK	Hasil Evaluasi
1.	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,948	3,394
2.	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,169	3,472
3.	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,868	3,234

Sumber data: Hasil evaluasi (QE) BPKP Perwakilan Provinsi Riau

2. Level Kapabilitas APIP (IACM)

Capaian Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP, untuk Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah berada pada level **3 (Integrated)** dengan skor **"3,590"** di akhir tahun 2024. Untuk mencapai level 3, melalui beberapa tahapan antara lain: 1). Melakukan *Self Assessment* untuk 6 elemen. 2). Perwakilan BPKP Provinsi Riau melakukan *Quality Assurance* atas laporan *Self Assesment* 3). Laporan QA yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau dilakukan reviu oleh BPKP Pusat 4). Tahap akhir adalah dilaksanakan ekspose Kapabilitas APIP oleh BPKP Pusat pada Desember 2024. Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah memenuhi semua dokumen



daftar uji yang terdiri dari 6 (enam) dokumen yaitu : 1. Peran dan layanan, 2. Pengelolaan SDM, 3. Praktik Profesional, 4. Manajemen Kinerja, 5. Hubungan dan Koordinasi 6. Struktur Tata Kelola Ekspose/pengujian dilakukan secara virtual yang dilakukan oleh penguji dari BPKP Pusat, terhadap tata kelola yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau melalui Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Hasil Kapabilitas Level 3 (*terintegrated*) sesuai dalam surat deputy kepala BPKP bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor Nomor PE.09.03/LHP- 246/PW04/6/2024 tanggal 29 Juli 2024.

Rumus yang digunakan untuk mengukur indikator capaian kinerja level kapabilitas APIP (IACM) adalah sebagai berikut :

Tingkat level Kapabilitas Inspektorat yang hendak dicapai yang di *Quality Assurance (QE)* oleh BPKP

Selain dari 2 indikator tersebut diatas ada beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau yaitu :

3. Persentase laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang terselesaikan.

Sebagaimana tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 Inspektorat Daerah melaksanakan pemeriksaan terkait : pemeriksaan regular, audit investigasi, Audit tujuan tertentu, reviu, monitoring dan pengawasan lainnya. Untuk gambaran hasil pengawasan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:



Tabel 2.5

**Rekapitulasi Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Riau
Tahun 2024**

NO	JUDUL LAPORAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES	JUM
1	LAPORAN REVIU LAINNYA	1	2	0	3	0	2	4	3	4	2	3	1	25
2	PERMINTAAN OPD	4	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	8
3	LAPORAN IKTISAR	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
4	LAPORAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTEKUTU (LATT)	6	2	0	0	3	3	1	2	2	2	0	1	22
5	LAPORAN OPNAME KAS (PENUTUPAN KAS)	33	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
6	LAPORAN AUDIT KHUSUS KEPEGAWAIAN (LATT-WAN)	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	2	1	9
7	LAPORAN AUDIT DANA HIBAH	0	8	7	1	0	2	0	0	0	0	0	0	18
8	LAPORAN LKJIP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	LAPORAN PENDAMPINGAN	0	1	2	5	0	3	3	0	0	3	0	0	17
10	LAPORAN VERIFIKASI	0	1	2	1	0	2	3	4	0	1	1	2	17
11	LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI LAINNYA	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
12	LAPORAN HASIL REVIU RENSTRA	0	1	9	7	0	0	2	2	0	0	0	0	21
13	LAPORAN HASIL REVIU DAK	0	2	3	2	2	3	9	0	2	7	1	6	37
14	LAPORAN REVIU HPS	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	10
15	LAPORAN MONITORING	0	0	1	0	0	0	0	2	1	13	5	2	24
16	LAPORAN PENILAIAN KAPABILITAS APIP	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
17	LAPORAN HASIL REVIU LKPD	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	LAPORAN EVALUASI LAINNYA	0	0	1	2	10	8	1	0	0	3	5	1	31



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

19	LAPORAN REVIU LPPD	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20	LAPORAN REVIU LKJIP	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	33
21	LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (RB)	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
22	LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	5
23	LAPORAN AUDIT KERUGIAN NEGARA (LHAPKN)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
24	LAPORAN HASIL REVIU RKPDP	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
25	LAPORAN EVALUASI EPPD ATAU LPPD	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	8
26	LAPORAN EVALUASI SAKIP/ LAKIP	0	0	0	0	0	32	1	0	0	0	0	0	33
27	LAPORAN PROBITY AUDIT	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	2	1	11
28	LAPORAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
29	LAPORAN AUDIT INVESTIGASI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
30	LAPORAN AUDIT OPERASIONAL (KETAATAN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	17	20
31	LAPORAN SPIP	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
32	LAPORAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)	0	0	0	0	0	0	0	42	53	5	0	0	100
33	LAPORAN REVIU RKA	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6
34	LAPORAN DUMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
35	LAPORAN AUDIT BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	18	1	0	23
36	LAPORAN AUDIT SPBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
37	LAPORAN AUDIT BUMD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
38	LAPORAN AUDIT BOS DAN BOSDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
JUMLAH KESELURUHAN		46	22	37	60	20	62	44	61	74	59	28	34	565



4. Persentase hasil Evaluasi

Ada beberapa kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau pada tahun 2024. Evaluasi ini juga telah tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024. Capaian hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau dapat dilihat dari Tabel dibawah ini:

Tabel 2.6

Rekapitulasi Pelaksanaan Evaluasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2024

NO	JUDUL LAPORAN	LHP
1	EVALUASI ATAS KAPASITAS APIP	1
2	EVALUASI ATAS UPAYA PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EXTRIM	1
3	EVALUASI PENURUNAN PREVALENSI STUNTING	1
4	EVALUASI PENGANGGURAN TERBUKA	1
5	EVALUASI PENGENDALIAN INFLASI	1
6	EVALUASI PENINGKATAN INVESTASI	1
7	EVALUASI ATAS PENGUATAN KOPERASI DAN UMKM	1
8	EVALUASI ATAS DAYA SAING DESTINASI PARIWISATA DI KAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1
9	EVALUASI RB TEMATIK DAN GENERAL	1
10	EVALUASI PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK	1
11	EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PBJ	4
12	EVALUASI SAKIP OPD	34
13	EVALUASI ATAS SPM	12
14	EVALUASI LPPD	12
15	EVALUASI PPRG	1
JUMLAH KESELURUHAN		73



Dari tabel diatas maka dapat di gambarkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah mengeluarkan laporan hasil evaluasi sebanyak 73 LHE. Yang terdiri dari :

1. Laporan evaluasi RB terdiri dari lapran evaluasi RB pada perangkat daerah tahun anggaran 2024 dan laporan hasil evaluasi pelaksanaan RB tahun 2024 TW II.
2. Laporan hasil evaluasi ZI di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, BAPPEDA, RSUD Arifin Achmad, SMKN 1 Tembilahan.
3. Laporan atas hasil evaluasi SAKIP di 33 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, data ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7

Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP OPD Provinsi Riau Tahun 2023 Tahun Evaluasi 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	KATEGORI
1.	Inspektorat Daerah	81,80	A (Memuaskan)
2.	BAPPEDALITBANG	80,30	A (Memuaskan)
3.	BPKAD	80,10	A (Memuaskan)
4.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	79,45	BB (Sangat Baik)
5.	Badan Kepagawain Daerah	78,80	BB (Sangat Baik)
6.	Bapenda	78,35	BB (Sangat Baik)
7.	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	77,85	BB (Sangat Baik)
8.	Dinas Energi dan SDM	75,95	BB (Sangat Baik)
9.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	75,25	BB (Sangat Baik)
10.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	74,80	BB (Sangat Baik)
11.	Dinas Pendidikan	74,60	BB (Sangat Baik)
12.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	74,55	BB (Sangat Baik)
13.	Dinas Pariwisata	74,55	BB (Sangat Baik)
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74,20	BB (Sangat Baik)
15.	Dinas Kesehatan	73,80	BB (Sangat Baik)
16.	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	72,15	BB (Sangat Baik)
17.	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	71,40	BB (Sangat Baik)



NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	KATEGORI
18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	70,80	BB (Sangat Baik)
19.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	70,75	BB (Sangat Baik)
20.	Dinas Perkebunan	70,70	BB (Sangat Baik)
21.	Satpol PP	70,60	BB (Sangat Baik)
22.	Dinas Sosial	70,45	BB (Sangat Baik)
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	70,15	B (Baik)
24.	Dinas Perhubungan	69,90	B (Baik)
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	68,90	B (Baik)
26.	Sekretariat DPRD	68,55	B (Baik)
27.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	68,15	B (Baik)
28.	Dinas Kepemuda dan Olahraga	68,05	B (Baik)
29.	Dinas Kebudayaan	67,70	B (Baik)
30.	Dinas Kelautan dan Perikanan	67,50	B (Baik)
31.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	66,45	B (Baik)
32.	Badan Penghubung	64,85	B (Baik)
33.	Sekretariat Daerah	61,45	B (Baik)

Sumber: Laporan Nilai SAKIP Sub Bagian Analisa dan Evaluasi

4. Laporan hasil evaluasi LPPD yaitu laporan hasil EPPD tahun 2023 terhadap LPPD kabupaten/kota tahun 2023 di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hulu.

5. Persentase OPD yang difasilitasi

Indikator kinerja OPD yang di fasilitasi adalah merupakan kegiatan pendampingan ke OPD di seluruh Pemerintah Provinsi Riau. Kegiatan ini dapat di gambarkan pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.8
Rekapitulasi Pelaksanaan Pendampingan Inspektorat Daerah Provinsi Riau
Tahun 2024

NO	JUDUL LAPORAN	JUMLAH LAPORAN
1	Laporan Hasil Pendampingan Penerapan Manajemen Resiko pada Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024.	1
2	Laporan Asistensi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Provinsi Riau.	1
3	Laporan Hasil Pendampingan Pemeriksaan Fisik Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Riau,	1
4	Laporan Asistensi Standar Perayanan Minimal (SPM) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.	1
5	Laporan Hasil Pendampingan Penyusunan Fraud Control Plan (FCP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.	1
6	Laporan Hasil Pendampingan Penyusunan Fraud Control Plan (FCP) Dinas Perkebunan Provinsi Riau.	1
7	Laporan Hasil Pendampingan Penyusunan Fraud Control Plan (FCP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.	1
8	Laporan Hasil Pendampingan Penyusunan Fraud Control Plan (FCP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.	1
9	Laporan Hasil Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024.	1
10	Laporan Hasil Pendampingan Penyusunan Fraud Control Plan (FCP) di 2 OPD di Lingkungan Provinsi Riau Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau.	1
11	Laporan Hasil Pendampingan Penyusunan Fraud Control Plan (FCP) di 2 OPD di Lingkungan Provinsi Riau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.	1
12	Laporan Pendampingan Reformasi Birokrasi dalam rangka Tindak Lanjut Renaksi Reformasi Birokrasi dan Mekanisme Penginputan Reformasi Birokrasi pada Portal Tahun 2024,	1



13	Laporan Hasil Pendampingan Penyusunan Fraud Control Plan (FCP) pada Dinas Perhubungan Proovinsi Riau.	1
14	Laporan Hasil Pendampingan Penyusunan Fraud Control Plan (FCP) pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau.	1
15	Laporan Survey Pendahuluan terkait netralisasi ASN dalam pelimukada tahun 2014 dinas Pendidikan	1
16	Laporan Pendampingan dan Asistensi FCP pada Dinas DISPRINDAG	1
17	Laporan Pendampingan dan Asistensi FCP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	1
JUMLAH KESELURUHAN		17

Dari keterangan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 Inspektorat Daerah telah melakukan :

1. *Fraud Control Plan* (FCP) sendiri merupakan suatu program yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi dan merespon kejadian berindikasi *fraud* (Kecurangan). untuk menghindari hal tersebut maka untuk melaksanakan program dan kegiatan maka perangkat daerah wajib menyusun risiko *Fraud*. Dalam mengoptimalkan dokumen identifikasi fraud di perangkat daerah maka Inspektorat melakukan pendampingan FCP di beberapa perangkat daerah di lingkungan Provinsi Riau yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Dinas Perkebunan Provinsi Riau, DLHK Provinsi Riau, Dinas ESDM Provinsi Riau, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perhubungan, Dinas Pangan dan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau, DISPERINDAG, Dinas Kelautan dan Perikanan.
2. Sebelum dilaksanakannya evaluasi Zona Integritas pada perangkat daerah, Inspektorat Daerah terlebih dahulu melaksanakan pendampingan Pembangunan Zona Integritas, hal ini bermanfaat untuk Membantu instansi pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN, bersih melayani, profesional berintegritas dan berkinerja tinggi.



3. Penyelenggaraan pemerintah desa telah di atur dalam Undang - Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa yang mana pada pasal 72 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa. Dan untuk menekan risiko korupsi dalam pengelolaan keuangan desa maka KPK mengeluarkan buku panduan desa anti korupsi, yang mana berguna untuk Sebagai panduan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, berwibawa, transparan, tidak diskriminasi, akuntabel dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dengan dukungan seluruh elemen masyarakatnya. Untuk mensosialisasikan panduan tersebut maka Inspektorat Daerah Provinsi Riau melaksanakan kegiatan pendampingan percontohan desa anti korupsi di beberapa kabupaten/kota Provinsi Riau.

Tabel 2.9**Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator/Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah
	2022	2023	2024	2025		
Jumlah OPD yang diusulkan Predikat WBK/WBBM	1	2	2	0	0	Inpektorat
Indeks Maturitas SPIP	3	3	3	3,10	3,20	Inpektorat
Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3,40	3,50	Inpektorat

Sumber : Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Prov. Riau 2019-2024

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Inspektorat menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;



- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah juga melaksanakan kegiatan mandatory sebagaimana telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2023, maka ada beberapa mandatory pusat focus pengawasan dan pembinaan yang akan dijalankan, antara lain :

- a. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim;
- b. Penurunan prevalensi stunting
- c. Pengangguran terbuka
- d. Pengendalian inflasi
- e. Peningkatan investasi
- f. Penguatan daya saing usaha
- g. Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
- h. Pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024
- i. Penguatan tata Kelola pemerintahan

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan

Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel,



maka Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah menetapkan tujuan, sasaran serta indikator capaian, sebagai berikut:

Tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Renstra 2019-2024 adalah: "Meningkatnya Kualitas Audit Intern dalam rangka mengoptimalkan nilai dan operasi Intansi Pemerintah" dengan sasarannya adalah :

- a. Meningkatnya efektifitas Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (*Anti corruption Activities*); dengan indikator Jumlah OPD yang diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM; dan
- b. Meningkatnya Kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (*Assurance and Consultant Activities*), dengan indikatornya Jumlah OPD dengan SPIP Level 3 dan Level Kapabilitas APIP

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hal-hal kritis yang mempengaruhi capaian kinerja Inspektorat Daerah adalah tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari data laporan hasil pengawasan masih banyak adanya temuan-temuan baik secara fisik maupun keuangan. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi Inspektorat Daerah yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kepatuhan perangkat daerah.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2019-2024 salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan pada visi ke 5 yakni "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima yang berbasis Teknologi Informasi**" dengan tujuan "**Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel**" dengan sasarannya "**Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah**" Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut maka pada tahun 2024 yang menjadi fokus



pengawasan dan pembinaan inilah bagaimana meningkatkan Nilai LPPD Pemerintah Provinsi Riau. Dengan strategi peningkatan dan reformasi birokrasi melalui arah kebijakan meningkatkan kualitas pengawasan daerah. Oleh karena hal tersebut diatas untuk tercapainya tujuan dan sasaran strategis ini maka beberapa yang yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah, yakni:

1. Implementasi maturitas SPIP Terintegrasi Pemrintah Provinsi Riau, yang menjadi penilaiannya adalah membangun lingkungan pengendalian, melakukan penilaian risiko di seluruh OPD Pemerintah Provinsi Riau, dilakukan pemantauan pengendalian intern, serta melaksanakan evaluasi atas penerapan SPIP;
2. Melakukan pendampingan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
3. Menindaklanjuti hasil rekomendasi hasil audit BPK/APIP
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang menjadi penilaiannya adalah: Tindaklanjuti temuan APIP, fokus audit berbasis risiko, dukungan anggaran APIP dan memiliki SDM APIP yang berkompeten.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah dapat di lihat dari tabel 2.10 di bawah ini:

Tabel 2.10

Pemetaan Masalah dan Hambatan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Riau yang bersih dan bebas korupsi belum optimal	Tingkat kerugian daerah hasil audit BPK yang tinggi	Masih rendahnya Tingkat pengendalian korupsi
		Tata kelola Pemerintahan belum optimal	Masih kurangnya Analisis Manajemen Risiko dan peta risiko lingkungan OPD di Provinsi Riau
		Tingkat kecurangan masih cukup tinggi	Belum dilakukannya identifikasi dan peta fraud di OPD
		Kegiatan pengawasan masih belum	Lemahnya pengetahuan Auditor dalam Implementasi



		memberikan dampak yang optimal bagi mitra	sistem pengukuran kinerja
		Masih rendahnya dukungan SDM yang berkompeten dalam bidang pengawasan	Kurangnya pelatihan dan pendidikan substantif kepada SDM dibidang pengawasan
			Belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana penunjang operasional pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan
		Belum terdapatnya perangkat daerah yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM"	Masih rendahnya informasi terkait penerapan Zona Integritas "menuju WBK/WBBM" pada perangkat daerah yang telah di usulkan

1.3.2 Dampak terhadap misi Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);

Dari permasalahan yang di hadapi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau bila tidak dapat dipecahkan maka akan berdampak pada tujuan Kepala daerah yang akan di capai yaitu **"Meningkatkan *Quality Assurance* penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel"**. Selain berdampak pada tujuan kepala daerah tentu berdampak pula terhadap pencapaian indikator kinerja (IK) Nilai LPPD yang mana untuk mencapai nilai LPPD dengan melalui strategi peningkatan penataan dan reformasi birokrasi dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas pengawasan daerah. Dalam upaya perbaikan reformasi birokrasi pada 8 area perubahan yang mana salah satunya pada area pengawasan perlu menjadi prioritas Inspektorat Daerah sebagai bentuk upaya membangun revolusi mental, sebagaimana yang tertuang dalam tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi yakni Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.



2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

- a. Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah adalah:
 1. Meningkatkan nilai kualitas pengawasan dalam mendukung pencapaian Nilai LPPD;
 2. Inspektorat sebagai pengawas intern pemerintah dapat melakukan pengawasan secara objektif dan independen;
 3. Memiliki Auditor yang handal sehingga dapat menghasilkan laporan audit yang optimal;
 4. APIP dituntut untuk dapat lebih memiliki pemahaman yang lebih sehingga dapat melaksanakan pembinaan kepada OPD lainnya;
 5. Meningkatnya penegakan integritas ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Riau
 6. Kepatuhan pengelola keuangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- b. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat daerah adalah:
 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Kewenangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku pengawas internal di Pemerintah Provinsi Riau;
 - 1 Memiliki jumlah APIP yang cukup memadai;
 2. Dukungan pemerintah pusat dalam penganggaran urusan pengawasan terkait penguatan APIP tertuang dalam Permendagri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Adanya tugas-tugas yang bersifat mandatory dari pusat mulai dari kemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kementerian Dalam Negeri
 3. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran Masyarakat terhadap hukum dan Kinerja Pemerintah.



2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Dari permasalahan dan hambatan yang ditemui, Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah merumuskan beberapa program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 adalah tahapan dimana membandingkan antara kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan pencapaian target Kinerja yang telah tertuang dalam rancangan awal RKPD. Dalam menganalisa kebutuhan program dan kegiatan dapat diuraikan apabila terdapat perbedaan dengan hasil rancangan RKPD. selain membandingkan kebutuhan program/kegiatan dengan rancangan awal RKPD pada tahun 2026 ini juga perlu diperhatikan adanya perubahan nomenklatur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Pemutakhiran Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam reuiu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Bahwa dalam penguatan pembinaan dan pengawasan maka mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD, meliputi :

a. Kegiatan Pengawasan yaitu :

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaank



- ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja;
- 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;
 - 3) Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
 - 4) Reviu laporan keuangan;
 - 5) Kegiatan pengawasan lainnya meliputi probity audit, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - 6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan



- melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.
- c. Sarana dan prasarana pengawasan antara lain seperti, laptop, dan alat pengukur beton.
 - d. Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya *Clean Government*, untuk menunjang kinerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) provinsi dan UPP kabupaten/kota
 - e. Pengawasan prioritas nasional meliputi Monev Dana Desa, dan BOS, Audit dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat;
 - f. Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap bupati/wali kota untuk Inspektorat Provinsi dan terhadap pemerintahan desa untuk Inspektorat Kabupaten/Kota dan evaluasi pelayanan publik; dan
 - g. Penegakan integritas, meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan
 - h. Kegiatan non pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
 - i. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat-alat untuk menunjang pengawasan seperti alat pengukur beton

Berkaitan dengan itu, maka Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi untuk wilayah provinsi bila diatas anggaran APBD Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) alokasi anggaran Inspektorat



paling sedikit sebesar **0,30%** (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Dengan adanya peraturan tersebut diatas dan banyak tugas pengawasan yang harus dilaksanakan dengan resiko yang cukup tinggi, maka Inspektorat Daerah Provinsi Riau mengajukan penambahan alokasi anggaran kepada tim TAPD Provinsi Riau.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Inspektorat Provinsi Riau tahun 2026 dapat dilihat dari Tabel 2.11 (Tabel T-C 31) dibawah ini:



Tabel 2.11 (Tabel T-C 31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat daerah Provinsi Riau

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Riau	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		41.833.305.858,39	Riau	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		36.117.148.796	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	130.000.000	Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18.024.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	130.000.000	Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		18.024.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Riau	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	35.679.652.038,39	Riau	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		32.492.121.360	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Riau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	160 Orang	35.679.652.038,39	Riau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	160 Orng	32.492.121.360	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Riau	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	100 Persen	914.010.000	Riau	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	100 Persen	200.630.000	



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Riau	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78 Orang	703.500.000	Riau	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78 Orang	200.630.000	Kegiatan ini digunakan untuk pengembangan SDM APIP (Auditor/ PPUPD dan Fungsional lainnya)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Riau	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		2.112.153.820	Riau	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		1.185.668.536	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Riau	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	35 Paket	110.000.000	Riau	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	35 Paket	49.999.094	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11 Paket	130.000.000	Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11 Paket	50.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	3 Paket	700.653.820	Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	3 Paket	405.288.388	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Riau	Jumlah Paket Barang dicetak dan digandakan yang disediakan	62 Paket	301.500.000	Riau	jumlah Paket Barang dicetak dan digandakan yang disediakan	62 Paket	209.118.054	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	710.000.000	Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	424.225.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Riau	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	160.000.000	Riau	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	47.038.000	



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Riau	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100 Persen	335.000.000	Riau	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	50.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Riau	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	165.000.000	Riau	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	2 Unit	50.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Riau	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	100 Persen	1.712.500.000	Riau	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1.410.994.900	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000	Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.975.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	400.000.000	Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	462.269.900	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Riau	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1.306.500.000	Riau	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	943.750.000	



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Riau	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 Persen	949.990.000	Riau	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 Persen	759.710.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Riau	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang dipelihara	14 Unit	399.990.000	Riau	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang dipelihara	14 Unit	399.990.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Riau	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	3 Unit	230.000.000	Riau	Jumlah ruang gedung yang dipelihara	3 Unit	49.910.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Riau	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	78 Unit	320.000.000	Riau	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	78 Unit	309.810.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Riau	Persentase Realisasi Audit/Jumlah Laporan Hasil Audit	100 Persen	8.538.000.000	Riau	Persentase Realisasi Audit/Jumlah Laporan Hasil Audit	100 Persen	3.288.274.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Riau	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 Persen	7.518.000.000	Riau	Persentase Realisasi Audit/Jumlah Laporan Hasil Audit	100 Persen	2.857.674.000	



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Riau	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan/ Pengawasan yang terselesaikan	80 Laporan	705.000.000	Riau	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan/ Pengawasan yang terselesaikan	80 Laporan	245.335.000	Kegiatan atas evaluasi & Pendampingan SAKIP PD, Evaluasi LPPD
	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Riau	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	415 Laporan	6.100.000.000	Riau	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	415 Laporan	2.343.155.000	Seluruh kegiatan audit sebaimana tertuang dalam PKPT
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Riau	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	132.000.000	Riau	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	49.400.000	Reviu atas LKJIP PD dan Pemprov Riau
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Riau	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan yang tepat waktu	1 Laporan	76.000.000	Riau	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan yang tepat waktu	1 Laporan	41.600.000	Reviu atas RKPD
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Riau	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Laporan	505.000.000	Riau	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Laporan	178.184.000	Kegiatan atas tindaklanjut temuan BPK dan APIP
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Riau	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Persen	1.020.000.000	Riau	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Persen	430.600.000	



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Riau	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	25 Laporan	1.020.000.000	Riau	Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 Laporan	430.600.000	Kegiatan yang mengakomodir pengaduan masyarakat serta audit tujuan tertentu
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Riau	Persentase laporan hasil evaluasi dan Persentase OPD yang di fasilitasi	100 Persen	3.615.000.000	Riau	Persentase laporan hasil evaluasi dan Persentase OPD yang di fasilitasi	100 Persen	664.380.000	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Riau	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang telah dibuat	100 Persen	230.000.000	Riau	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang telah dibuat	100 Persen	84.950.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Riau	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Laporan	230.000.000	Riau	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2 Rekomendasi	84.950.000	Kegiatan Rakorwasda
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Riau	Jumlah pendampingan yang di fasilitasi	100 Persen	3.385.000.000	Riau	Jumlah pendampingan yang di fasilitasi	100 Persen	579.430.000	
	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Riau	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	36 Perangkat Daerah	765.000.000	Riau	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	36 OPD	162.900.000	Kegiatan Pendampingan dan Evaluasi Atas SPIP terintegrasi (PM dan PK)
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Riau	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah	510.000.000	Riau	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah	63.150.000	Selain anggaran untuk pendampingan RB dan ZI juga diperlukan biaya atas Monev RB dan ZI



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Riau	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Laporan	910.000.000	Riau	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	239.170.000	Kegiatan meliputi Monev MCP, Stranas PK, WBS, Desa Anti Korupsi, FCP, Gratifikasi, dan Monev SPI
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Riau	Jumlah laporan pemberantasan pungutan liar, Laporan hasil survei penilaian integritas	6 Perangkat Daerah	1.200.000.000	Riau	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah	114.210.000	Kegiatan terdiri dari Pendampingan sosialisasi SABER PUNGLI
	JUMLAH								40.069.802.796	



2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Terkait dengan usulan program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau tidak mengakomodir usulan dari masyarakat karena Inspektorat Daerah Provinsi Riau bukan merupakan instansi teknis melainkan instansi yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Tabel 2.12 (T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Provinsi Riau

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	TIDAK ADA				



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

INSPEKTORAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah antara lain adalah sebagai mana yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 antara lain adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern dan meningkatnya efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

3.1.1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN-RB memiliki tujuan strategis yakni "***terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing***". Dari tujuan tersebut maka upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian PAN-RB adalah menciptakan birokrasi yang memiliki kemampuan yang andal dalam menghadapi revolusi industri 4.0. indikator yang akan di capai adalah nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Nasional yang merupakan gambaran pelaksanaan reformasi birokrasi seluruh instansi pemerintah baik K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh pemerintah K/L/P maka dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang



menggambarkan adanya 8 area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi yaitu:

1. Organisasi
2. Tata laksana
3. Sumber daya manusia aparatur SDM
4. Pengawasan
5. Akuntabilitas
6. Pelayanan publik
7. Pola pikir dan Budaya Kerja Aparatur

Dalam penguatan pengawasan yang menjadi tolak ukur penilaiannya adalah:

1. Pengendalian Gratifikasi
2. Penerapan SPIP
3. Wistle Blowing Sistem
4. Pengaduan Masyarakat
5. Penanganan Benturan Kepentingan
6. Pembangunan Zona Integritas
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Dari beberapa hal yang dikemukakan di atas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Inspektorat Daerah Provinsi Riau yakni Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

3.1.2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN-RB memiliki tujuan strategis yakni ***"terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing"***. Dari tujuan tersebut maka upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian PAN-RB adalah menciptakan birokrasi yang memiliki kemampuan yang andal dalam menghadapi revolusi industri 4.0. indikator yang akan di capai adalah nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Nasional yang



merupakan gambaran pelaksanaan reformasi birokrasi seluruh instansi pemerintah baik K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh pemerintah K/L/P maka dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menggambarkan adanya 8 area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi yaitu:

1. Organisasi
2. Tata laksana
3. Sumber daya manusia aparatur SDM
4. Pengawasan
5. Akuntabilitas
6. Pelayanan publik
7. Pola pikir dan Budaya Kerja Aparatur

Dalam penguatan pengawasan yang menjadi tolak ukur penilaiannya adalah:

1. Pengendalian Gratifikasi
2. Penerapan SPIP
3. Wistle Blowing Sistem
4. Pengaduan Masyarakat
5. Penanganan Benturan Kepentingan
6. Pembangunan Zona Integritas
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Dari beberapa hal yang dikemukakan di atas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Inspektorat Daerah Provinsi Riau Yakni Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025

Tahun 2026 ini merupakan tahun ke 2 rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Daerah (Renstra) tahun 2025- 2026.



Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Riau disusun dengan memperhatikan Tujuan dan sasaran kepala daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025–2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025.

Sebagaimana tertuang dalam rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sementara tujuan dan sasaran RPD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan Provinsi Riau.

Untuk itu, setiap tujuan dan sasaran perangkat daerah dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran (*impact*) yang terukur, relevan dan ditetapkan selama 2 (dua) tahun mulai dari tahun 2025 dan 2026.

Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai unit kerja pengawasan internal Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap urusan pemerintahan di Daerah Provinsi Riau. Sebagaimana tertuang dari RPD 2025-2026 program Inspektorat Daerah Provinsi Riau merupakan program yang mendukung tujuan kepala daerah yang hendak dicapai yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”** dengan sasarannya **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Digital Yang Lincah Kolaboratif, dan Akuntabel**, untuk menjalankan program tersebut maka Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu **“Meningkatnya Kualitas Audit Intern dalam rangka mengoptimalkan nilai dan operasi Intansi Pemerintah”** dengan sasaran- sasaran antara lain:

1. Meningkatkan efektifitas Penanganan dan Pengendalian Korupsi (*Anti Corruption Activities*)



2. Meningkatnya Kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (*Assurance dan Consultant Activities*)

Tujuan, sasaran dan indikator Inspektorat Daerah Provinsi Riau dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah
Provinsi Riau Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	
				2026	2027
1	Meningkatnya Kualitas Audit Intern dalam rangka mengoptimalkan nilai dan operasi Intansi Pemerintah		Nilai Maturitas SPIP	3,20	3,20
		Meningkatnya efektifitas Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (<i>Anti corruption Activities</i>)	Indeks Efetifitas Pengendalian korupsi (IEPK)	3,10	3,10
		Meningkatnya Kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (<i>Assurance dan Consultant Activities</i>)	Indeks Maturitas SPIP	3,20	3,20
			Level Kapabilitas APIP	3,50	3,50

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian tujuan kepala daerah yang tertuang dalam RPD Provinsi Riau Tahun 2025-2026;
2. Menyesuaikan dengan Pemutakhiran Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
3. Penyesuaian dengan rancangan awal RKPD;
4. Hasil kesepakatan dalam pelaksanaan forum perangkat daerah;
5. Melaksanakan apa yang menjadi amanah yang tertuang didalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Pelaksanaan reformasi birokrasi yang diatur



dalam Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025

6. Menyesuaikan dengan kondisi eksisting yang ada.

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhiran Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah maka Program di Inspektorat daerah Provinsi Riau dipisahkan menjadi 3 (tiga) dengan 11 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 1 sub kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 1 Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Dengan 2 Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 6 Sub Kegiatan yaitu:
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- c. Pengadaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 2 Sub Kegiatan yaitu: Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 3 Sub Kegiatan yaitu:
- Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- e. Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah, dengan 3 Sub kegiatan yaitu:
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesinnya lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan :

- a. Penyelenggaraan pengawasan internal, dengan 5 sub kegiatan yaitu:
- Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah
 - Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah
 - Reviu laporan kinerja
 - Reviu laporan keuangan
 - Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
- b. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengawasan dengan tujuan tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawaasn, dengan 1 sub kegiatan yaitu: Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan
- b. Pendampingan dan asistensi, dengan 4 sub kegiatan yaitu:
- Pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah
 - Pendampingan, asistensi verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi
 - Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi



➤ Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditetapkan indikator kinerja pada tiap program/kegiatan/sub kegiatan yang hendak dicapai. Indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud harus spesifik, fokus, terukur, dan jelas hal ini untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.



Tabel 3.2 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Riau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju tahun 2027	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Riau	100 Persen	36.117.148.796	APBD			43.937.939.860
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Riau	100 Persen	18.024.000	APBD			133.900.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Riau	4 Dokumen	18.024.000	APBD			133.900.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	Riau	100 Persen	32.492.121.360	APBD			37.991.601.725



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju tahun 2027	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Riau	160 Orang	32.492.121.360	APBD			37.991.601.725
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	Riau	100 Persen	200.630.000	APBD			724.605.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Riau	78 Orang	200.630.000	APBD			724.605.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	Riau	100 Persen	1.185.668.536	APBD			2.175.518.435
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Riau	35 Paket	49.999.094	APBD			113.300.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Riau	11 Paket	50.000.000	APBD			133.900.000



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju tahun 2027	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Riau	3 Paket	405.288.388	APBD			721.673.435
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Paket Barang dicetak dan digandakan yang disediakan	Riau	62 Paket	209.118.054	APBD			310.545.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Riau	52 Laporan	424.225.000	APBD			731.300.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Riau	10 Dokumen	47.038.000	APBD			164.800.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Riau	100 Persen	50.000.000	APBD			169.950.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Riau	2 Unit	50.000.000	APBD			169.950.000



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju tahun 2027	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Riau	100 Persen	1.410.994.900	APBD			1.763.875.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Riau	1 Laporan	4.975.000	APBD			6.180.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Riau	1 Laporan	462.269.900	APBD			412.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Riau	1 Laporan	943.750.000	APBD			1.345.695.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Riau	100 Persen	759.710.000	APBD			978.489.700
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang dipelihara	Riau	14 Unit	399.990.000	APBD			411.989.700



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju tahun 2027		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Riau	3 Unit	49.910.000	APBD			236.900.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Riau	78 Unit	309.810.000	APBD			329.600.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang terselesaikan	Riau	100 Persen	3.288.274.000	APBD			9.824.140.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Riau	100 Persen	2.857.674.000	APBD			8.773.540.000
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang terselesaikan	Riau	80 Laporan	245.335.000	APBD			726.150.000
	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Riau	415 Laporan	2.343.155.000	APBD			7.313.000.000



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju tahun 2027	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Riau	3 Laporan	49.400.000	APBD			135.960.000
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan yang tepat waktu	Riau	1 Laporan	41.600.000	APBD			78.280.000.000
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Riau	4 Laporan	178.184.000	APBD			520.150.000
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Riau	100 Peersen	430.600.000	APBD			1.050.600.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Riau	25 Laporan	430.600.000	APBD			1.050.600.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase laporan hasil evaluasi dan Persentase OPD yang di fasilitasi	Riau	100 Peersen	664.380.000	APBD			3.723.450.000



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju tahun 2027		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang telah dibuat	Riau	100 Peersen	84.950.000	APBD			236.900.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Riau	2 Rekomendasi	84.950.000	APBD			236.900.000
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan yang di fasilitasi	Riau	100 Persen	579.430.000	APBD			3.486.550.000
	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Riau	36 OPD	162.900.000	APBD			787.950.000
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Riau	36 Perangkat Daerah	63.150.000	APBD			525.300.000



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju tahun 2027	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Riau	2 Kegiatan	239.170.000	APBD			937.300.000
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Riau	6 Perangkat Daerah	114.210.000	APBD			1.236.000.000
JUMLAH					40.069.802.796				57.485.529.860



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab ini fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2026. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Riau yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Sesuai dengan Pemutakhiran Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 terdapat 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub Kegiatan



Dalam merumuskan program/kegiatan perangkat daerah Tahun 2026 telah sesuai dengan program yang tertuang pada di RPD

Perumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:



Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Provinsi Riau (SIPD)

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Riau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju tahun 2027	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Riau	100 Persen	36.117.148.796	APBD			43.937.939.860
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Riau	100 Persen	18.024.000	APBD			133.900.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Riau	4 Dokumen	18.024.000	APBD			133.900.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	Riau	100 Persen	32.492.121.360	APBD			37.991.601.725



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju tahun 2027	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Riau	160 Orang	32.492.121.360	APBD			37.991.601.725
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	Riau	100 Persen	200.630.000	APBD			724.605.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Riau	78 Orang	200.630.000	APBD			724.605.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	Riau	100 Persen	1.185.668.536	APBD			2.175.518.435
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Riau	35 Paket	49.999.094	APBD			113.300.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Riau	11 Paket	50.000.000	APBD			133.900.000



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju tahun 2027	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Riau	3 Paket	405.288.388	APBD			721.673.435
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Paket Barang dicetak dan digandakan yang disediakan	Riau	62 Paket	209.118.054	APBD			310.545.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Riau	52 Laporan	424.225.000	APBD			731.300.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Riau	10 Dokumen	47.038.000	APBD			164.800.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Riau	100 Persen	50.000.000	APBD			169.950.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Riau	2 Unit	50.000.000	APBD			169.950.000



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju tahun 2027	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Riau	100 Persen	1.410.994.900	APBD			1.763.875.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Riau	1 Laporan	4.975.000	APBD			6.180.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Riau	1 Laporan	462.269.900	APBD			412.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Riau	1 Laporan	943.750.000	APBD			1.345.695.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Riau	100 Persen	759.710.000	APBD			978.489.700
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang dipelihara	Riau	14 Unit	399.990.000	APBD			411.989.700



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju tahun 2027		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Riau	3 Unit	49.910.000	APBD			236.900.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Riau	78 Unit	309.810.000	APBD			329.600.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang terselesaikan	Riau	100 Persen	3.288.274.000	APBD			9.824.140.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Riau	100 Persen	2.857.674.000	APBD			8.773.540.000
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang terselesaikan	Riau	80 Laporan	245.335.000	APBD			726.150.000
	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Riau	415 Laporan	2.343.155.000	APBD			7.313.000.000



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju tahun 2027	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Riau	3 Laporan	49.400.000	APBD			135.960.000
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan yang tepat waktu	Riau	1 Laporan	41.600.000	APBD			78.280.000.000
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Riau	4 Laporan	178.184.000	APBD			520.150.000
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Riau	100 Peersen	430.600.000	APBD			1.050.600.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Riau	25 Laporan	430.600.000	APBD			1.050.600.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase laporan hasil evaluasi dan Persentase OPD yang di fasilitasi	Riau	100 Peersen	664.380.000	APBD			3.723.450.000



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju tahun 2027		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang telah dibuat	Riau	100 Peersen	84.950.000	APBD			236.900.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Riau	2 Rekomendasi	84.950.000	APBD			236.900.000
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan yang di fasilitasi	Riau	100 Persen	579.430.000	APBD			3.486.550.000
	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Riau	36 OPD	162.900.000	APBD			787.950.000
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Riau	36 Perangkat Daerah	63.150.000	APBD			525.300.000



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju tahun 2027	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Riau	2 Kegiatan	239.170.000	APBD			937.300.000
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Riau	6 Perangkat Daerah	114.210.000	APBD			1.236.000.000
JUMLAH					40.069.802.796				57.485.529.860



BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Riau 2026 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1(satu) tahun yang memuat Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, Lokasi, kelompok sasaran, Indikator Kinerja dan Pagu Pendanaan Indikatif. Rencana kinerja diintegrasikan dengan proses manajemen lainnya seperti penganggaran, pemantauan, pengendalian dan evaluasi untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan. Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026 ini disusun berpedoman pada Renstra 2025-2026 melalui pembahsan forum perangkat daerah.

Inspektorat Tahun Anggaran 2026 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Riau.

Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan akan bisa mengakomodir seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 Provinsi Riau yang disesuaikan dengan pagu anggaran Inspektorat.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini sebagai langkah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 dan Prakiraan Tahun 2027.

Demikian renja Inspektorat Daerah Provinsi Riau 2026 disusun sebagai rencana program prioritas dan juga sebagai tolak ukur evaluasi kegiatan, program untuk jangka waktu satu tahun serta merupakan komitmen dari seluruh aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Riau serta menjadi pedoman dan arah kegiatan tahun 2026.

Renja Inspektorat Daerah Provinsi Riau 2026 juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan untuk lebih memantapkan terselenggaranya



kegiatan prioritas Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD, sekaligus untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Inspektorat Daerah Provinsi Riau sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Pekanbaru, Januari 2026
Plt. Inspektur Daerah Provinsi Riau



Ir. AGUS RIANTO, MT
Pembina Tk.I
NIP. 19680809 199303 1 004



PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts. 700.1.1.2/1p-sekr/xi/45

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna kelancaran proses penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau perlu menetapkan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025

Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

12. Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta melakukan evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya;
- b. melakukan koordinasi dan penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan Dokumen Kebijakan lainnya.
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya;
- d. menyusun draft kerja penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2026;
- e. terlibat secara penuh dalam pembahasan dan penyusunan Rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2026;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah Provinsi Riau.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pekanbaru, 3 November 2025

Pit.INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU



Ir. AGUS PIANTO MT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts. 700.1.1.2 / 1p-Sekr / XI

TANGGAL : 3 November 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL
1.	Penanggung Jawab	Ir. Agus Rianto, MT	Plt. Inspektur Daerah Provinsi Riau
2.	Ketua	Logi Prestisa, ST	Ka Tim Perencanaan
3.	Anggota	Putri Bestari, SST, MKM	Staf Perencanaan
4.	Anggota	Riefki Dwi Putra, S.Farm, MH	Staf Perencanaan
5.	Anggota	Agus Krisna, S.H., M.H.	Staf Perencanaan
6.	Anggota	Rut Handayani, SE	Staf Perencanaan
7.	Anggota	Dianda Fattah Ramadhan, A.Md.Ak	Staf Perencanaan
8.	Anggota	Azmon Syatriadi, SE	Staf Perencanaan
9.	Anggota	Yudi Ramadhona, A.Md	Staf Perencanaan

Pekanbaru, 3 November 2025

Plt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU

Ir. AGUS RIANTO, MT

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680809 199303 1 004

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN PEMBAHASAN
RINCIAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2026**

Nomor : 000.7.2.4/Bappeda/2025/

Pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan Pembahasan Rincian Renja Inspektorat Daerah Provinsi Riau, yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini :

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Penjelasan teknis pembahasan oleh pimpinan rapat;
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta rapat teknis Rincian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2026, sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan rapat, maka seluruh peserta :

MENYEPAKATI

- KESATU** : Menyepakati Rincian Sub Kegiatan, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- KEDUA** : Menyepakati Catatan Pembahasan Rincian Sub Kegiatan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN II), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan ini; dan
- KEEMPAT** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-PD) Provinsi Riau Tahun 2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Mei 2025

a.n. INSPEKTUR DAERAH PROV. RIAU

Sekretaris,



Ir. AGUS RIANTO, MT
NIP. 19680809 199303 1 004

a.n. BAPPEDA PROVINSI RIAU

Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia



RAJA JUARISMAN, ST, M.Si
NIP.19720611 200012 1 002

()

BAPENDA PROVINSI RIAU

()

BIRO PBJ SETDA PROVINSI RIAU

()

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI RIAU

()

**BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
SETDA PROVINSI RIAU**

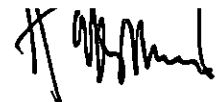
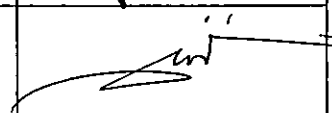
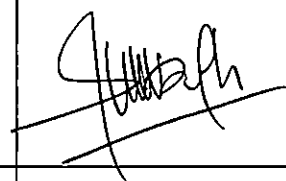

()

**BIRO ADM PEMBANGUNAN SETDA
PROVINSI RIAU**

()

Menyetujui,
Wakil Peserta,

No.	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Desniriza, SH., M.Si	Bappeda Provinsi Riau	Fungsional Perencana Madya	
2.	Ari Dianuari. ST	Bappeda Provinsi Riau	Fungsional Perencana Muda	
3.	Fadil Muhammad Salim, S.STP., M.Si	Bappeda Provinsi Riau	Penelaah Teknis Kebijakan	

				
5.	RIEFKI DWI PUTRA, S. Farm, MH	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	
6.	RUT HANDAYANI, SE	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Pengelola Program dan Kegiatan	
7.	DIANDA FATTAH RAMADHAN, A.Md.Ak	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Pengelola Data Informasi	

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) INSPEKTORAT PROVINSI RIAU
TAHUN 2026**



No	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	CATATAN PEMBAHASAN	
						TARGET 2026	PAGU INPUTAN PENYEMPURNAAN RANWAL	PEMBAHASAN	BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI			SUMBER DANA
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	12
	INSPEKTORAT						42.845.439.592	42.845.439.592	-				
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						5.425.292.094	5.402.500.094	(22.792.000)				
	INSPEKTORAT DAERAH						5.425.292.094	5.402.500.094	(22.792.000)				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-				4.229.590.094	4.229.590.094	-				
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-				3.798.340.094	3.798.340.094	-				
001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				80 Laporan	296.460.000	296.460.000	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tambahkan rincian belanja cetak untuk laporan
002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				415 Laporan	3.171.773.094	3.171.773.094	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tambahkan rincian belanja cetak untuk laporan
003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				3 Laporan	61.250.000	61.250.000	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		- Tambahkan rincian belanja cetak untuk laporan - reviu rkp, pps, lkpj
004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	52.500.000	52.500.000	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Laporan keuangan pemprov riau sebelum ke BPK 2. tambahkan rincian belanja cetak untuk laporan
007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	216.357.000	216.357.000	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Tindak lanjut BPK, BPKP, inspektorat, APIP 2. Tambahkan rincian belanja cetak untuk laporan
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-				431.250.000	431.250.000	-				
002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				25 Laporan	431.250.000	431.250.000	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Mempertimbangkan keluarnya perpres 46 tahun 2025 terkait penanganan kasus terutama untuk pelimpahan kasus barang dan jasa (APH) 2. Tambahkan rincian belanja cetak untuk laporan
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-				1.195.702.000	1.172.910.000	(22.792.000)				
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-				85.262.000	62.470.000	(22.792.000)				

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	CATATAN PEMBAHASAN
						TARGET 2026	PAGU INPUTAN PENYEMPURNAAN RANWAL	PEMBAHASAN	BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	12
001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	85.262.000	62.470.000	(22.792.000)	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perjalanan dinas dipindahkan ke rutin
	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	1.110.440.000	1.110.440.000	-			-	
001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				36 Perangkat Daerah	312.950.000	312.950.000	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Bahwa tahun depan tidak ada lagi tenaga ahli IT berdasarkan informasi dari BKD kecuali CS, supir, pramusaji (outsourcing) 2. Belanja perjanjian pendampingan untuk kapabilitas apip, manajemen resiko, pendampingan SPIP
002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				36 Perangkat Daerah	63.175.000	63.175.000	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	
003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	417.855.000	417.855.000	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	
004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				6 Perangkat Daerah	316.460.000	316.460.000	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	
	NON URUSAN						37.420.147.498	37.442.939.498	22.792.000				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN						37.420.147.498	37.442.939.498	22.792.000				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						37.420.147.498	37.442.939.498	22.792.000				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.435.000	25.435.000	-				
001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	25.435.000	25.435.000	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						32.492.121.360	32.492.121.360	-				
001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				160 Orang/ Bulan	32.492.121.360	32.492.121.360	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.163.046.000	1.163.046.000	-				
002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				150 Paket	137.200.000	137.200.000	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	
009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				78 Orang	1.025.846.000	1.025.846.000	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.518.578.198	1.541.370.198	22.792.000				
001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				35 Paket	50.000.000	50.000.000	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	
002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	50.000.000	50.000.000	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	
004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	476.027.703	476.027.703	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	CATATAN PEMBAHASAN		
						TARGET 2026	PAGU INPUTAN PENYEMPURNAAN RANWAL	PEMBAHASAN	BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI			SUMBER DANA	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	12	
005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				62 Paket	242.550.495	242.550.495	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		
009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52 Laporan	650.000.000	672.792.000	22.792.000	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		
010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	-			-		
009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0	0	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		
010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	50.000.000	50.000.000	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	1.411.116.940	1.411.116.940	-			-		
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.975.000	4.975.000	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		
002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	462.269.900	462.269.900	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		
004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	943.872.040	943.872.040	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	759.850.000	759.850.000	-			-		
001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				14 Unit	399.990.000	399.990.000	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		
006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				78 Unit	309.860.000	309.860.000	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		
011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	50.000.000	50.000.000	-	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		
J U M L A H								42.845.439.592	42.845.439.592	-				

- I : 1. Untuk biaya pada rincian objek mengacu pada satuan standar harga dan satuan standar biaya yang ada sesuai ketentuan yang berlaku
2. Pembahasan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah masing masing tim pembahas

Pekanbaru, 26 Mei 2025

PERANGKAT DAERAH	TIM PEMBAHAS					
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU	BAPPEDA PROVINSI RIAU	BPKAD PROVINSI RIAU	BAPENDA PROVINSI RIAU	BIRO PBJ SETDA PROVINSI RIAU	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI RIAU	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI RIAU
 Ir. AGUS RIANTO, MT NIP. 19680809 199303 1 004						



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 November 2025

Plt. GUBERNUR RIAU,

TTD

S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256

email : inspektorat@riau.go.id website : inspktorat.riau.go.id

PEKANBARU

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU	Disusun oleh	SHELVYA EFRILINA, S.Ak
	Tanggal	10 November 2025
	Direviu oleh	AULIA OSNA RAHMA WANTO, SH, MH
	Tanggal	10 November 2025
	Disetujui oleh	RONI COKRO SUBAGIO, SE, M.Si
	Tanggal	10 November 2025

CATATAN HASIL REVIU

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

Uraian Catatan Hasil Reviu	No Indeks KKR
A. Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD);	KKR.001
Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 belum sepenuhnya didukung dengan dokumen yang memadai.	
B. Pengujian atas Kesesuaian Sistematika Penulisan dan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR.002
Penyajian Sistematika penulisan dan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 sudah sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Bappeda Provinsi Riau Nomor: 000.7/136/ BAPPEDA-BIDANG I/2025 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Provinsi Riau Tahun 2026.	
C. Pengujian Atas Kesesuaian Rancangan Akhir Renja-PD dengan Rancangan Akhir RKPD	KKR.003
Rumusan tujuan dan sasaran dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 pada Bab III sudah selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran pada Bab IV Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026;	
D. Pengujian Atas Penyusunan Subtansi Antar Bab Rancangan Akhir Renja-PD meliputi :	
1. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada BAB III Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Didasarkan pada Isu-Isu Penting	KKR.004.1

<p>Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada BAB II Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)</p>	
<p>Penetapan Tujuan, Sasaran, sudah didukung dengan Program dan Kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2026, serta penetapan tujuan dan sasaran sudah didasari atas isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Riau;</p>	
<p>2. Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)</p>	KKR.004.2
<p>Penyajian Substansi antar Bab pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 belum selaras dan mendukung indikator kinerja program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2026.</p>	
<p>3. Keselarasan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat dalam Renstra, RKPD dan Ranhir Renja Perangkat Daerah;</p>	KKR.004.3
<p>Penyajian rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 belum selaras dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026.</p>	
<p>4. Keselarasan Rumusan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renstra, RKPD dan Rancangan Akhir Renja;</p>	KKR.004.3.1
<p>Penyajian rumusan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 belum selaras dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026.</p>	
<p>5. Keselarasan Rumusan Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat dalam Renstra, RKPD dan Ranhir Renja Perangkat Daerah;</p>	KKR.004.3.2
<p>Penyajian rumusan Target Kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 belum sepenuhnya mempedomani target kinerja pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)</p>	
<p>6. Keselarasan Pagu Renstra, RKPD 2025 dengan Pagu Ranhir Renja 2026;</p>	KKR.004.4

Lampiran 1 : KKR, 001

NO	DOKUMEN	CATATAN REVIU			
		HARD COPY	SOFT COPY	KETERANGAN	REKOMENDASI
1.	Rancangan akhir Renja-PD 2026	Ada	Ada		
2.	Renstra Perangkat Daerah 2025 – 2029	Ada	Ada		
3.	RKPD Tahun 2026	Ada	Ada	Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025.	
4.	Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya (Formulir E. 55)	Tidak Ada	Tidak Ada		Untuk dilengkapi Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya
5.	Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan (Renja) Perangkat Daerah (Formulir E. 29)	Tidak Ada	Tidak Ada		Untuk dilengkapi Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
6.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah (SKPD)	Tidak Ada	Tidak Ada		Untuk dilengkapi Berita Acara Forum SKPD
7.	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2025	Tidak Ada	Tidak Ada		Untuk dilengkapi Berita Acara Musrenbang RKPD
8.	Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Renja-PD, dan Kebijakan Pemerintah Daerah.	Ada	Ada	Surat Gubernur Riau Nomor: 000.7.2.4/ Bappeda-Bid I/ 2025/4818 dan Surat Bappeda Nomor : 000.7/136/ BAPPEDA-BIDANG I/2025.	
9.	Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	Rancangan Akhir Renja masih di verifikasi oleh Bappeda.	
10.	Orientasi dan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah.	Tidak Ada	Tidak Ada		Untuk dilengkapi Orientasi dan Agenda Kerja
11.	Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD);	Ada	Ada	Kpts. 700.1.1.2/IP-Sekr/XI/45 tanggal 3 November 2025	
12.	Kertas Kerja Pengumpulan Data dan Informasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada		Untuk dilengkapi Kertas Kerja dalam Penyusunan Renja-PD

Lampiran 2 : KKR. 002

NO	BAB	SISTEMATIKA PENULISAN	PENYAJIAN DALAM DOKUMEN MENURUT		CATATAN PEREVIU
			PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017	RANCANGAN AKHIR RENJA-PD 2026	
	1	2	3	3	4
1.	I	PENDAHULUAN	Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.	PENDAHULUAN	SESUAI
		1.1 Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPd, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.	1.1. Latar Belakang	SESUAI
		1.2. Dasar Hukum Penyusunan	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	1.2 Dasar Hukum	SESUAI
		1.3 Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.	1.3 Maksud dan Tujuan	SESUAI
		1.4 Sistematika Dokumen Renja-PD	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	1.4 Sistematika Penulisan	SESUAI
2.	II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.		EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	SESUAI
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra	Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra	SESUAI

		Perangkat Daerah	<p>Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.</p> <p>Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. <p>Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:</p>		
		2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	<p>Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.</p> <p>Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.</p> <p>Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.</p> <p>Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing,</p>	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Riau	SESUAI

			dengan format Tabel T-C.30 sebagaiberikut:		
		2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.	<p>1. Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;</p> <p>Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;</p> <p>2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;</p> <p>3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional /internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable DevelopmentGoals</i>);</p> <p>4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan</p> <p>5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.</p>	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Riau	SESUAI
		2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	<p><u>Berisikan uraian mengenai:</u></p> <p>1. Proses yang dilakukannya itu membandingkan antararancang awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;</p> <p>2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;</p> <p>3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan</p> <p>4. Lampirkan table berikut, Tabel T-C.31:</p>	2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	SESUAI
		2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	SESUAI

			<p>musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Sajikan Tabel T-C.32 		
3	III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH	SESUAI
		3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.	Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	SESUAI
		3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026	SESUAI
		3.3 Program dan Kegiatan	<p>Berisikan penjelasan mengenai:</p> <p>a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b. Pencapaian SDGs, c. Pengentasan kemiskinan, d. Pencapaian NSPK dan SPM, e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, f. Pengembangan daerah terisolir, g. Dsb. <p>b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah program dan jumlah kegiatan. 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar keberbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). 	3.3 Program dan Kegiatan	SESUAI

			<p>3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.</p> <p><i>c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.</i></p> <p><i>d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut</i>Dijadikan untuk BAB IV</p>		
4	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	<p>Berisikan uraian mengenai :</p> <p>Hasil inputan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada SIPD RI sesuaikan target indicator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan RKPD</p>	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU	SESUAI
5	V	PENUTUP	<p>Berisikan uraian penutup, berupa:</p> <p>a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.</p> <p>C. Rencanat indak lanjut.</p> <p>Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan</p>	PENUTUP	SESUAI

Lampiran 3 : KKR.003

NO	TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH DALAM RANCANGAN AKHIR RENJA-PD	TUJUAN/SASARAN PADA RANCANGAN AKHIR RPKD	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN PEREVIU DAN REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
1.	MENINGKATNYA KUALITAS AUDIT INTERN DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN NILAI DAN OPERASI INSTANSI PEMERINTAH	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	SESUAI		
	Meningkatnya efektifitas Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (Anti corruption Activities)	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Digital Yang Lincah Kolaboratif, dan Akuntabel	SESUAI		Sasaran dalam dokumen RPKD sudah dirumuskan menjadi Tujuan dalam Dokumen Renja.
	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (Assurance dan Consultant Activities)				

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENJA, PROGRAM DAN KEGIATAN	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	CATATAN REVIU		
			SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
	MENINGKATNYA KUALITAS AUDIT INTERN DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN NILAI DAN OPERASI INSTANSI PEMERINTAH				
	Meningkatnya efektifitas Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (Anti corruption Activities)	Masih rendahnya Tingkat pengendalian korupsi	SESUAI		
	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (Assurance dan Consultant Activities)	Masih kurangnya Analisis Manajemen Risiko dan peta risiko lingkungan OPD di Provinsi Riau	SESUAI		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Belum dilakukannya identifikasi dan peta fraud di OPD	SESUAI		
6.01.02.1.01	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	Lemahnya pengetahuan Auditor dalam Implementasi sistem pengukuran kinerja	SESUAI		
6.01.02.1.02	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	Kurangnya pelatihan dan pendidikan substantif kepada SDM dibidang pengawasan	SESUAI		
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana penunjang operasional pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan	SESUAI		
6.01.03.1.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</i>	Masih rendahnya informasi terkait penerapan Zona Integritas "menuju WBK/WBBM" pada perangkat daerah yang telah di usulkan	SESUAI		
6.01.03.1.02	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>		SESUAI		

Lampiran 5 : KKR. 4.2

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		CATATAN HASIL REVIU		
		RENSTRA	RENJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)					
6.0101.1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>					TIDAK SESUAI	Rumuskan Indikator Kegiatan di Renja untuk mendukung Indikator Program
6.01.001.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	SESUAI		
6.01.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)</i>		<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi</i>			TIDAK SESUAI	Rumuskan Indikator Kegiatan di Renja untuk mendukung Indikator Program
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	SESUAI		
6.01.01.1.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Paket</i>		<i>Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi</i>			TIDAK SESUAI	Rumuskan Indikator Kegiatan di Renja untuk mendukung Indikator Program
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)</i>						
6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	SESUAI		
6.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	SESUAI		
6.01.01.1.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>		<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>			TIDAK SESUAI	Rumuskan Indikator Kegiatan di Renja untuk mendukung Indikator Program

		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)						
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	SESUAI		
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	SESUAI		
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	SESUAI		
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	SESUAI		
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	SESUAI		
6.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	SESUAI		
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan		TIDAK SESUAI		Rumuskan Indikator Kegiatan di Renja untuk mendukung Indikator Program
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang						

		<i>Disediakan (Unit)</i>						
6.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	SESUAI		
6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	SESUAI		
6.01.01.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>		<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>			TIDAK SESUAI	Rumuskan Indikator Kegiatan di Renja untuk mendukung Indikator Program
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>						
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>						
6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	SESUAI		
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	SESUAI		
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	SESUAI		
6.01.01.1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)</i>		<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>			TIDAK SESUAI	Rumuskan Indikator Kegiatan di Renja untuk mendukung Indikator Program
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>						
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>						

		(Unit)						
6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)			Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara		TIDAK SESUAI	Rumuskan Indikator Sub Kegiatan pada Renja untuk mendukung indicator program dan kegiatan.
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara		TIDAK SESUAI	Rumuskan Indikator Sub Kegiatan pada Renja untuk mendukung indicator program dan kegiatan.
6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	SESUAI		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1 (%)	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang Terselesaikan				TIDAK SESUAI	Rumuskan Indikator Program pada Renja
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)		Tertaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal			TIDAK SESUAI	Rumuskan Indikator Kegiatan di Renja untuk mendukung Indikator Program
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)						
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)						
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)						
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)						
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan/ Pengawasan yang terselesaikan		TIDAK SESUAI	Rumuskan Indikator Sub Kegiatan pada Renja untuk mendukung indicator program dan kegiatan.
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	SESUAI		

		(Laporan)			(Laporan)			
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	SESUAI		
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)			Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan yang tepat waktu	SESUAI		
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	SESUAI		
6.01.02.1.02	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)</i>		<i>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>			TIDAK SESUAI	Rumuskan Indikator Kegiatan di Renja untuk mendukung Indikator Program
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	SESUAI		
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah (Indeks)	Persentase Laporan Hasil Evaluasi dan Persentase OPD yang difasilitasi				TIDAK SESUAI	Rumuskan Indikator Program pada Renja
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP) (Nilai)						
6.01.03.1.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)</i>		<i>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang telah dibuat</i>			TIDAK SESUAI	Rumuskan Indikator Kegiatan di Renja untuk mendukung Indikator Program
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	SESUAI		
6.01.03.1.02	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)</i>		<i>Jumlah Pendampingan yang di Fasilitasi</i>			TIDAK SESUAI	Rumuskan Indikator Kegiatan di Renja untuk mendukung Indikator Program

		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)</i>						
		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)</i>						
		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)</i>						
6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	SESUAI		
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	SESUAI		
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	SESUAI		
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	SESUAI		

KODE	RUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PADA			CATATAN PEREVIU
	RENSTRA	RKPD 2026	RANHIR RENJA 2026	
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
6.0101.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
6.01.001.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
6.01.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Sub Kegiatan tidak terdapat dalam dokumen Renstra dan Renja
6.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan tidak terdapat dalam dokumen RKPD
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
6.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
6.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan tidak terdapat dalam dokumen RKPD
6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	

6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING AN DAN ASISTENSI	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING AN DAN ASISTENSI	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING AN DAN ASISTENSI	
6.01.03.1.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawas an dan Fasilitasi Pengawas an</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawas an dan Fasilitasi Pengawas an</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawas an dan Fasilitasi Pengawas an</i>	
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
6.01.03.1.02	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	
6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Lampiran 7 : KKR.004.3.1

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RUMUSAN INDIKATOR KINERJA DALAM			CATATAN HASIL REVIU		
		RENSTRA	RKPD	RENJA	SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	7	8	9
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	SESUAI		
6.0101.1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Perencanaan Daerah (Dokumen)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			TIDAK SESUAI	Rumuskan Kembali Indikator Kegiatan pada Renja dan RKPD sesuai dengan Indikator Kegiatan pada Renstra.
6.01.001.1.01.0001	Penyusunan Perencanaan Daerah	Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	SESUAI	
6.01.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)</i>	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi</i>	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi</i>		TIDAK SESUAI	Rumuskan Kembali Indikator Kegiatan pada Renja dan RKPD sesuai dengan Indikator Kegiatan pada Renstra.
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)			
6.01.01.1.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Paket)</i>	<i>Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi</i>	<i>Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi</i>		TIDAK SESUAI	Rumuskan Kembali Indikator Kegiatan pada Renja dan RKPD sesuai dengan Indikator Kegiatan pada Renstra.
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)</i>					
6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			
6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			TIDAK SESUAI	Rumuskan Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan pada Renstra dan Renja sesuai dengan RKPD.
6.01.01.1.05.0011	Bimbingan Implementasi Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		TIDAK SESUAI	Rumuskan Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sesuai dengan Rumusan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
6.01.01.1.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi</i>	<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi</i>		TIDAK SESUAI	Rumuskan Kembali Indikator Kegiatan pada Renja dan RKPD sesuai dengan Indikator

							Kegiatan pada Renstra.
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>					
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>					
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</i>					
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>					
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>					
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	SESUAI		
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	SESUAI		
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	SESUAI		
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	SESUAI		
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	SESUAI		
6.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	SESUAI		
6.01.01.1.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan</i>	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan</i>	TIDAK SESUAI		Rumuskan Kembali Indikator Kegiatan pada Renja dan RKPd sesuai dengan Indikator Kegiatan pada Renstra.
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>					
6.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	TIDAK SESUAI		Rumuskan Kembali Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan, karena sub kegiatan ini tidak terdapat dalam dokumen RKPd.

6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	SESUAI	
6.01.01.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	TIDAK SESUAI	Rumuskan Kembali Indikator Kegiatan pada Renja dan RKPD sesuai dengan Indikator Kegiatan pada Renstra.
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>				
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>				
6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	SESUAI	
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	SESUAI	
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	SESUAI	
6.01.01.1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)</i>	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	TIDAK SESUAI	Rumuskan Kembali Indikator Kegiatan pada Renja dan RKPD sesuai dengan Indikator Kegiatan pada Renstra.
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>				
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>				
6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	TIDAK SESUAI	Rumuskan Kembali Indikator Sub Kegiatan sesuai dengan indikator sub kegiatan pada RKPD dan Renstra.
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	TIDAK SESUAI	Rumuskan Kembali Indikator Sub Kegiatan sesuai dengan indikator sub kegiatan pada RKPD dan Renstra.
6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	TIDAK SESUAI	Rumuskan Kembali Indikator Sub Kegiatan sesuai dengan indikator sub kegiatan pada RKPD dan Renstra.
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindakan lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1 (%)	Tindakan lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1 (%)	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan /Pengawasan yang terselesaikan	TIDAK SESUAI	Rumuskan Kembali Indikator Program sesuai dengan Indikator Program pada RKPD dan Renstra.

6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal		TIDAK SESUAI	Rumuskan Kembali Indikator Kegiatan pada Renja dan RKPd sesuai dengan Indikator Kegiatan pada Renstra.
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)					
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)					
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)					
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)					
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang terselesaikan		TIDAK SESUAI	Rumuskan Kembali Indikator Sub Kegiatan sesuai dengan Indikator sub kegiatan pada RKPd dan Renstra.
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	SESUAI		
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	SESUAI		
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan yang tepat waktu	SESUAI		
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	SESUAI		
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		TIDAK SESUAI	Rumuskan Kembali Indikator Kegiatan pada Renja dan RKPd sesuai dengan Indikator Kegiatan pada Renstra.
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	SESUAI		
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Indeks)	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Indeks)	Persentase Laporan Hasil Evaluasi dan Persentase OPD yang difasilitasi		TIDAK SESUAI	Rumuskan Kembali Indikator Program sesuai dengan Indikator Program pada RKPd dan Renstra.
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP) (Nilai)	Kapabilitas Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP) (Nilai)				

6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang telah dibuat	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang telah dibuat		TIDAK SESUAI	Rumuskan Kembali Indikator Kegiatan pada Renja dan RKPd sesuai dengan Indikator Kegiatan pada Renstra.
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	SESUAI		
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	Jumlah Pendampingan yang di Fasilitasi	Jumlah Pendampingan yang di Fasilitasi		TIDAK SESUAI	Rumuskan Kembali Indikator Kegiatan pada Renja dan RKPd sesuai dengan Indikator Kegiatan pada Renstra.
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)					
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)					
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)					
6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	SESUAI		
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	SESUAI		
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	SESUAI		
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	SESUAI		

Lampiran 8 : KKR.004.3.2

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA			HASIL REVIU		REKOMENDASI
			RENSTRA	RKPD	RENJA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	100%	100%	SESUAI		Untuk dapat dirumuskan kembali Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RENJA yang disesuaikan dengan Target Kinerja yang sudah ditetapkan dalam Renstra
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%		TIDAK SESUAI	
6.01.001.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	SESUAI		
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	160 Orang/Bulan	100%	100%		TIDAK SESUAI	
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	160 Orang/Bulan	160 Orang/Bulan	160 Orang/Bulan	SESUAI		
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Paket)	150 Paket	100%	100%		TIDAK SESUAI	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	78 Orang					
6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	150 Paket	150 Paket	150 Orang	SESUAI		
6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		78 Orang			TIDAK SESUAI	
6.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	78 Orang		78 Orang		TIDAK SESUAI	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11 Paket	100%	100%		TIDAK SESUAI	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	10 Dokumen					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	52 Laporan					

6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	79 Laporan	80 Laporan	80 Laporan		TIDAK SESUAI	
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	250 Laporan	415 Laporan	415 Laporan		TIDAK SESUAI	
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	174 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		TIDAK SESUAI	
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		TIDAK SESUAI	
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Laporan		TIDAK SESUAI	
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	20 Laporan	100%	100%		TIDAK SESUAI	
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	20 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	SESUAI		
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas Penyelenggara an Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Indeks)	3,450 Indeks	3,450 Indeks	100%		TIDAK SESUAI	
		Kapabilitas Aparat Pengawas an Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3,674 Nilai	3,674 Nilai				
6.01.03.1.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)</i>	<i>2 Rekomendasi</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>		TIDAK SESUAI	
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	SESUAI		
6.01.03.1.02	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)</i>	<i>8 Kegiatan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>		TIDAK SESUAI	
		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan an Daerah (Perangkat Daerah)</i>	<i>70 Perangkat Daerah</i>					
		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)</i>	<i>14 Perangkat Daerah</i>					

		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	2 Perangkat Daerah					
6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	70 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah		TIDAK SESUAI	
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	14 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah		TIDAK SESUAI	
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	8 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan		TIDAK SESUAI	
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	2 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah		TIDAK SESUAI	

Lampiran 9 : KKR. 004.4

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU 2026			CATATAN PEREVIU
		RENSTRA	RKPD	RANHIR RENJA	
1	2	3	4	5	6
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.419.834.169,00	36.107.438.260,00	37.420.147.498,00	
6.01.01.1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	25.435.000,00	25.435.000,00	25.435.000,00	SESUAI
6.01.001.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.435.000,00	25.435.000,00	25.435.000,00	SESUAI
6.01.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	32.501.658.031,00	32.492.121.360,00	32.492.121.360,00	SESUAI
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.501.658.031,00	32.492.121.360,00	32.492.121.360,00	SESUAI
6.01.01.1.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	1.163.046.000,00	200.664.000,00	1.163.046.000,00	Pagu di Renja berbeda dengan RKPD
6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	137.200.000,00	0,00	137.200.000,00	Pagu tidak terdapat dalam RKPD
6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	200.664.000,00	0,00	Pagu hanya terdapat dalam RKPD
6.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.025.846.000,00	0,00	1.025.846.000,00	Pagu tidak terdapat dalam RKPD
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	49.999.094,00	50.000.000,00	Pagu Sub kegiatan di Renja lebih besar dari RKPD
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	SESUAI
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	476.027.703,00	476.032.715,00	476.027.703,00	Pagu sub kegiatan lebih kecil dari RKPD
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	242.550.495,00	242.550.221,00	242.550.495,00	SESUAI
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650.000.000,00	299.935.000,00	650.000.000,00	Pagu Sub Kegiatan di Renja lebih besar dari RKPD
6.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000,00	49.996.000,00	50.000.000,00	Pagu Sub Kegiatan di Renja lebih besar dari RKPD
6.01.01.1.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	SESUAI

6.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	Pagu tidak terdapat pada Renstra, RKPD dan Renja
6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	SESUAI
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.411.116.940,00	1.410.994.900,00	1.411.116.940,00	Pagu Kegiatan di Renja lebih besar dari RKPD
6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.975.000,00	4.975.000,00	4.975.000,00	SESUAI
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	462.269.900,00	462.269.900,00	462.269.900,00	SESUAI
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	943.872.040,00	943.750.000,00	943.872.040,00	Pagu Sub Kegiatan di Renja lebih besar dari RKPD
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	750.000.000,00	759.710.000,00	759.850.000,00	Pagu Kegiatan di Renja lebih besar dari RKPD
6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.000.000,00	399.990.000,00	399.990.000,00	SESUAI
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000,00	309.810.000,00	309.860.000,00	Pagu Sub Kegiatan di Renja lebih besar dari RKPD
6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	49.910.000,00	50.000.000,00	Pagu Sub Kegiatan di Renja lebih besar dari RKPD
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.229.392.000,00	3.992.757.000,00	4.229.590.094,00	Pagu Program di Renja lebih besar dari RKPD
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.798.142.000,00	3.691.507.000,00	3.798.340.094,00	Pagu Kegiatan di Renja lebih besar dari RKPD
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	296.460.000,00	296.435.000,00	296.460.000,00	Pagu Sub Kegiatan di Renja lebih besar dari RKPD
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3.171.575.000,00	3.064.965.000,00	3.171.773.094,00	Pagu Sub Kegiatan di Renja lebih besar dari RKPD
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	61.250.000,00	61.250.000,00	61.250.000,00	SESUAI
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	SESUAI
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	216.357.000,00	216.357.000,00	216.357.000,00	SESUAI
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	431.250.000,00	301.250.000,00	431.250.000,00	Pagu Kegiatan di Renja lebih besar dari RKPD

6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	431.250.000,00	301.250.000,00	431.250.000,00	Pagu Sub Kegiatan di Renja lebih besar dari RKPD
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.195.702.000,00	739.142.000,00	1.195.702.000,00	Pagu Program di Renja lebih besar dari RKPD
6.01.03.1.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	<i>85.262.000,00</i>	<i>85.262.000,00</i>	<i>85.262.000,00</i>	SESUAI
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	85.262.000,00	85.262.000,00	85.262.000,00	SESUAI
6.01.03.1.02	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>1.110.440.000,00</i>	<i>653.880.000,00</i>	<i>1.110.440.000,00</i>	Pagu Kegiatan di Renja lebih besar dari RKPD
6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	312.950.000,00	162.900.000,00	312.950.000,00	Pagu Sub Kegiatan di Renja lebih besar dari RKPD
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	63.175.000,00	63.175.000,00	63.175.000,00	SESUAI
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	417.855.000,00	311.770.000,00	417.855.000,00	Pagu Sub Kegiatan di Renja lebih besar dari RKPD
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	316.460.000,00	116.035.000,00	316.460.000,00	Pagu Sub Kegiatan di Renja lebih besar dari RKPD
		42.844.928.169,00	40.839.337.260,00	42.845.439.592,00	Pagu di Renja lebih besar dari RKPD

Lampiran 10 : KKR.004.5

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PERATURAN TENTANG SPM/NSPK		RANHIR RENJA		CATATAN HASIL REVIU		
		INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN/ REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1 (%)	87.00%			Tidak dapat dilakukan Pengujian dikarenakan Inspektorat Tidak Melaksanakan SPM/NSPK
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	79 Laporan			
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	174 Laporan			
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	4 Dokumen			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	250 Laporan			
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1 Laporan			
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	79 Laporan			
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	250 Laporan			
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	174 Laporan			
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1 Laporan			

6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	4 Dokumen		
6.01.02.1.02	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)</i>	<i>20 Laporan</i>		
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	20 Laporan		
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Indeks)	3,450 Indeks		
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3,674 Nilai		
6.01.03.1.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)</i>	<i>2 Rekomendasi</i>		
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2 Rekomendasi		
6.01.03.1.02	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)</i>	<i>8 Kegiatan</i>		
				<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)</i>	<i>70 Perangkat Daerah</i>		
				<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)</i>	<i>14 Perangkat Daerah</i>		

				<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)</i>	<i>2 Perangkat Daerah</i>			
6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	70 Perangkat Daerah			
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	14 Perangkat Daerah			
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	8 Kegiatan			
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	2 Perangkat Daerah			

TABEL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA INSPEKTORAT PROVINSI RIAU
TAHUN 2026

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1.	BAB I	PENDAHULUAN			
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	V		
	1.2 Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	V		
	1.3 Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.	V		
	1.4 Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	V		
2.	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023			
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian	Berisikan uraian mengenai : 1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	V V		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	Renstra Perangkat Daerah	<p>3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;</p> <p>4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;</p> <p>5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;</p> <p>6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; dan</p>	V		
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	<p>1. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK;</p> <p>2. Sajikan Tabel T-C.30</p>	V		
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	<p>Berisikan uraian mengenai :</p> <p>1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;</p> <p>2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;</p> <p>3. Dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>);</p>	V		
			V		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan	V		
	2.4 Review terhadap RKPD	Berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat didalam RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan 4. Sajikan Tabel T-C.31	V		
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	Berisikan uraian mengenai : 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Sajikan Tabel T-C.32	V		
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Berisikan uraian mengenai : Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	V		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah; 2. Target Indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada Renja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.	V V		
	3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Berisikan uraian mengenai : 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan; 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan; 3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan 4. Sajikan Tabel T-C.33	V		
4	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH			
		Berisikan uraian mengenai : Hasil inputan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada SIPD RI sesuaikan target indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan RKPD	V		
5	BAB V	PENUTUP			
		Berisikan uraian mengenai : 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; 3. Rencana tindak lanjut;	V		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen(tanggal terbit Pergub Renja), nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah , serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.			
6	LAMPIRAN	1. Format pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan renstra perangkat daerah tahun 2025-2026 dengan program/kegiatan/sub kegiatan SIPD-RI (Renja 2025) 2. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 3. BA Hasil Review Inspektorat	V		

Pekanbaru, 3 November 2025

Inspektorat Daerah Provinsi Riau
Sekretaris,

Ir. AGUS RIANTO, MT
NIP. 19680809 199303 1 004

Penyusun :

NAMA : Logi Prestisa, ST
NIP : 19800914 201001 1 018

NAMA : Putri Bestari, SST, MKM
NIP : 19861210 200803 2 002



Mengetahui,
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bappeda Provinsi Riau

RAJA JUARISMAN, ST. M.Si
NIP. 19770611 200012 1 002

Verifikator :

1. NAMA : Desniriza, SH., M.Si
NIP : 19721209 199803 2 003

2. NAMA : Ari Dianuari, ST
NIP : 19810103 200902 1 002

3. NAMA : Fadil Muhammad Salim, S.STP., M.Si
NIP : 19950504 201708 1 002

